

# **PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH RAWAN BENCANA KEBAKARAN DI KELURAHAN LINGKAS UJUNG KOTA TARAKAN**

Evans Oktaviansyah

Program Magister Teknik Sipil Minat Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya  
Jalan MT. Haryono No. 167 Malang Jawa Timur Indonesia 65145 Telp. (0341) 587710  
e-mail: Evans\_oktaviansyah@yahoo.com

## **ABSTRAK**

*Ketersediaan lahan dan perkembangan aktivitas perkotaan yang tidak seimbang akan menyebabkan permasalahan permukiman. Kondisi tersebut terjadi pada kawasan pesisir pantai di Kota Tarakan yang berakibat pada tumbuhnya permukiman kumuh kota. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh di Kelurahan Lingkas Ujung Kota Tarakan beserta kerawanan kebakaran permukiman dan rencana penanganannya. Metode pendekatan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif-evaluatif, dengan metode pem bobotan tingkat kekumuhan dan kebakaran. Hasil yang didapatkan yaitu 1) Permukiman di Kelurahan Lingkas Ujung berupa perkampungan di atas air dengan mayoritas struktur bangunan non permanen dan kumuh. 2) Wilayah dengan kategori kumuh memiliki kecenderungan rawan kebakaran, hal ini dipengaruhi oleh faktor kepadatan bangunan dan struktur bangunan. Rukun Tetangga (RT) dengan kategori paling kumuh berada di RT 6 dan 11, sedangkan RT lainnya termasuk kategori kumuh sedang. RT yang tidak tergolong kumuh adalah RT 1. Tingkat kerawanan kebakaran di Kelurahan Lingkas Ujung dipengaruhi oleh kepadatan bangunan, aksesibilitas, struktur bangunan dan sumber air. RT yang termasuk sangat rawan kebakaran adalah RT 2, 3, 8, 14, 16, dan 18. 3) Penataan kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu jangka pendek untuk permasalahan kebakaran, persampahan dan sanitasi, sedangkan rencana jangka panjang dengan peremajaan kawasan.*

*Kata Kunci : Bahaya Kebakaran, Permukiman Kumuh.*

## **ABSTRACT**

*Unbalance condition between land supply and the growth of urban activities will cause a settlement problem. This conditions also happened in coastal zone of Tarakan which resulting the slum areas. The purposes of this research are to identify the characteristics, to evaluate the vulnerability of fire hazard and find the solutions for the slum problem in Lingkas Ujung, Tarakan. The research uses descriptive- evaluative approach, and the main analysis is the 'scoring method' for identifying the slum and fire hazard areas. The results are 1) The slum areas of Lingkas Ujung Tarakan are classified into coastal slum area, which most of them are floating houses. 2) The areas which calssified into slum area have high vulnerability of fire hazard. This condition affected by the building density and building structure. The area categorized the worst slum are block (rukun tetangga) 6 and 11, and the other categorized medium slum. Block 1 is not categorized into slum area, because this block has low population and density bulding. The vulnerability of fire hazard in Lingkas Ujung affected by building density, accessibility, building structure and water resource. The block categorized into high risk of fire hazard are block 2, 3, 8, 14, 16 and 18. 3) The solutions of slum area in Lingkas Ujung Tarakan are; short term approach purpose to solve the fire risk, waste management and sanitation, long time approach purpose to redesign the area, using land consolidation.*

*Keywords: Slum Area, Fire Hazard*

## **PENDAHULUAN**

Laju perkembangan ekonomi perkotaan yang semakin pesat membuat intensitas kegiatan perkotaan meningkatkan dan pemanfaatan lahan yang semakin kompetitif, sedangkan di sisi lain, urbanisasi menyebabkan tingginya permintaan lahan tempat tinggal di dalam kota. Pemerintah cenderung terfokus pada pengembangan ekonomi dan cenderung melupakan aspek pertumbuhan kawasan di wilayah pinggiran (Hesley, 1995).

Permukiman yang terbentuk semakin lama akan semakin padat, baik bangunan maupun penduduknya. Keadaan lingkungan akan semakin menurun, ruang terbuka untuk penyegaran semakin langka dan juga berkurangnya ruang untuk umum dan tempat bermain anak-anak. Keadaan fisik yang semakin menurun akhirnya menjadi ciri-ciri kampung kota dan sangat berbeda dengan kampung di desa, daerah tersebut dinamakan daerah slum (kumuh) (Johan Silas, 1990).

Kondisi tersebut terjadi pula pada kawasan permukiman tepi pantai di Kota Tarakan dengan ciri-ciri fisik yang mirip dengan karakteristik kampung kota atau permukiman kumuh kota. Terdapat beberapa kelurahan yang merupakan kawasan tepi Pantai Barat yakni Kelurahan Karang Rejo, Kelurahan Selumit Pantai serta Kelurahan Lingkas Ujung. Tulisan ini akan membahas mengenai identifikasi permukiman kumuh rawan kebakaran di pesisir Kota Tarakan, dengan fokus studi di Kelurahan Lingkas Ujung.

Definisi pemukiman kumuh (slum area) (Johan Silas, 1990) sebagai berikut;

- Kawasan yang proses pembentukannya karena keterbatasan kota dalam menampung perkembangan kota sehingga timbul kompetisi dalam menggunakan lahan perkotaan. Sedang kawasan pemukiman berkepadatan tinggi merupakan embrio permukiman kumuh.
- Kawasan yang lokasi penyebarannya secara geografis terdesak perkembangan kota yang semula baik lambat laun menjadi kumuh.

Terdapat empat tipe permukiman kumuh yaitu : (Tylor, 1972)

- Permukiman kumuh yang terdapat di atas sungai atau tepian pantai dan laut yang disebut sebagai "rumah terapung atau penghuni liar yang tinggal di atas perahu"
- Permukiman kumuh yang digolongkan sebagai kampung di sebelah dalam kota.
- Permukiman kumuh yang digolongkan sebagai kelompok hunian liar yang relatif terpusat di tengah kota (termasuk didalamnya permukiman kumuh di sempadan sungai dan sempadan rel kereta api).
- Permukiman kumuh yang digolongkan sebagai gubuk liar di daerah pinggiran kota.

Penentuan kriteria kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kesesuaian peruntukan lokasi dengan rencana tata ruang, status (kepemilikan) tanah, letak/ kedudukan lokasi, tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan bangunan, kondisi fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal.

Kebakaran terjadi karena adanya sejumlah pemicu yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain; pembakaran sampah, puntung rokok, hubungan pendek arus listrik, maupun kondisi lingkungan permukiman yang buruk. Kondisi lingkungan permukiman yang buruk dapat ditemui pada kawasan permukiman kumuh. Titik api pada bahan organik terjadi jika ada tiga faktor yang berperan didalamnya yaitu bahan bakar, oksigen dan panas yang hadir dalam jumlah tertentu. (Kepmen PU no.11/KPTS/ 2000)

## METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif-evaluatif yang didapatkan dari hasil observasi lapangan, evaluasi/ penilaian maupun kuisioner responden.

Lokasi studi adalah Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan (Gambar 1). Ketailan pembahasan permasalahan permukiman kumuh dibatasi hingga ketailan RT (Rukun Tetangga) dengan menggunakan instrumen pembobotan variabel di setiap wilayah RT.

### Penentuan Populasi dan Sampel

Penilaian terhadap kondisi kekumuhan dilakukan secara menyeluruh di wilayah studi. Besarnya kesempatan setiap sampel untuk diteliti adalah sama, dengan pertimbangan keseragaman karakter populasi. Teknik yang digunakan untuk mendapatkan sampel dengan kesempatan yang sama dan keseragaman karakter di wilayah studi adalah sampel acakan (random sampling) (Singarimbun, 1989). Responden ditentukan berdasarkan sampel/sampling yang dihitung dengan rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2} \dots\dots\dots(1)$$

n = Jumlah Sampel (rumah/hunian)  
 N = Total Populasi  
 e = Nilai Kritis (5 %)

Jumlah sampel di wilayah studi yang digunakan dalam penelitian, berdasarkan perhitungan rumus tersebut sebagai berikut:

$$n = \frac{2369}{1 + 2369 \times (0,05)^2}$$

$$n = \frac{2369}{1 + 2369 \times 0,0025}$$

$$n = \frac{2369}{6,9}$$

$$n = 343 \text{ sampel rumah/hunian}$$

Menggunakan persamaan (1) diperoleh jumlah sampel (n) 343 sampel dari populasi rumah sebanyak 2.369 (Profil Kelurahan Lingkas Ujung, 2011). Pembagian sampel setiap RT, selengkapnya dapat dilihat di tabel 1.

### Metode Analisis

Secara umum penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisa yang digunakan berupa pembobotan tingkat kekumuhan dan bahaya kebakaran berdasarkan pedoman Dirjen Pekerjaan Umum,

Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh, tahun 2006 dan Ketetapan Kerawanan Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tarakan tahun 2010.

Penetapan lokasi kawasan permukiman kumuh digunakan kriteria-kriteria yang dikelompokkan kedalam kriteria:

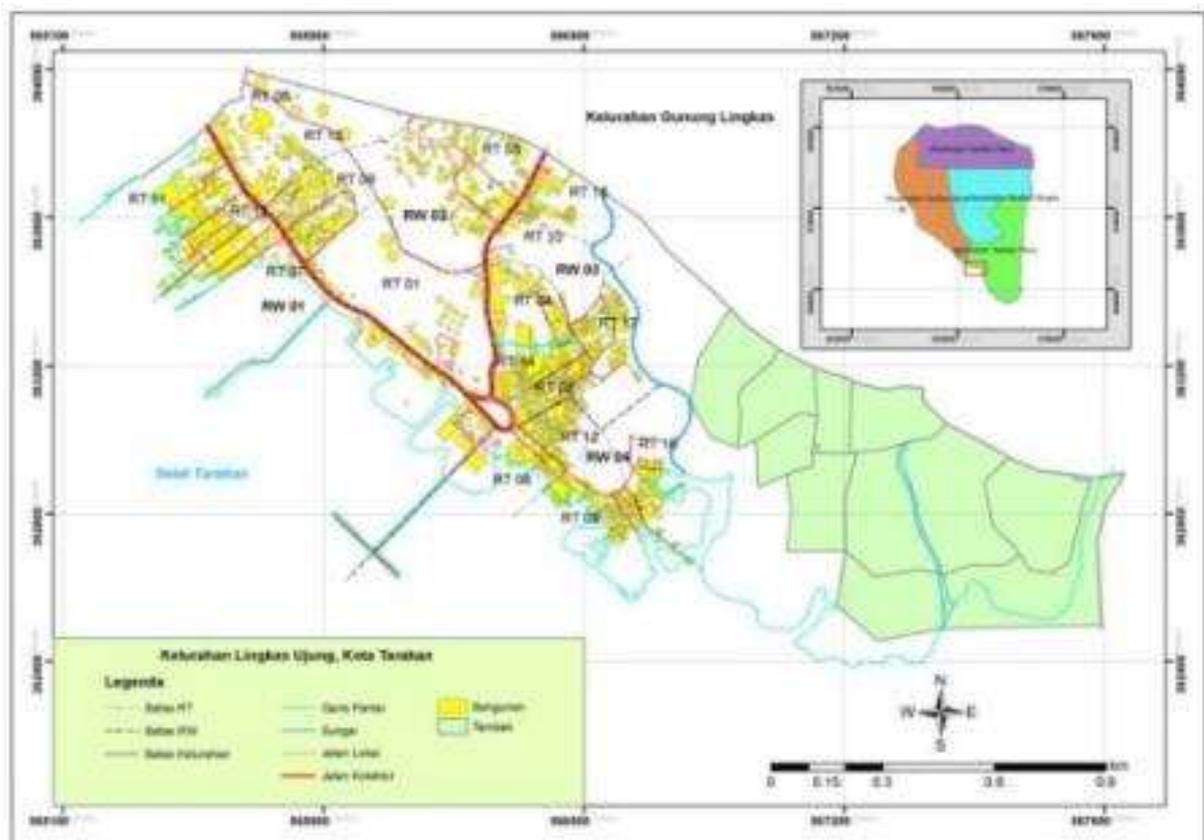
- Vitalitas Non Ekonomi
- Vitalitas Ekonomi Kawasan
- Status Kepemilikan Tanah
- Sarana dan Prasarana
- Komitmen Pemerintah

Berdasarkan Laporan Identifikasi dan Dokumentasi Informasi Daerah Rawan Kebakaran tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Bidang Penanggulangan Kebakaran Dinas Tata Kota Tarakan dapat dirumuskan sejumlah indikator penilaian daerah rawan sebagai berikut:

- Kepadatan Bangunan
- Aksesibilitas
- Kondisi Fisik Bangunan
- Sumber Air

**Tabel 1. Data Persebaran Jumlah Sampel**

Rukun Tetangga	Jumlah Rumah	Persentase	Jumlah Sampel
1	174	7.3	25
2	108	4.5	15
3	67	2.8	10
4	84	3.5	12
5	114	4.8	16
6	160	6.7	23
7	84	3.5	12
8	287	12.1	41
9	94	4.0	14
10	110	4.6	16
11	178	7.5	26
12	149	6.3	22
13	100	4.2	14
14	85	3.6	12
15	186	7.8	28
16	158	6.7	23
17	130	5.5	19
18	101	4.3	15
Total	2369	100.0	343 sampel



**Gambar 1. Lokasi Penelitian**

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Vitalitas Ekonomi

Keberadaan permukiman kumuh akan mengurangi kualitas lingkungan dan cenderung menyebabkan masalah, baik terkait aspek tata ruang, sosial dan ekologi. Pada umumnya keberadaan permukiman kumuh dikarenakan rendahnya perekonomian masyarakat (Jenkis, 2005). Kondisi mata pencaharian masyarakat pesisir Kelurahan Lingkas Ujung sebagian besar nelayan, atau buruh pabrik pengolahan ikan (gambar 2). Tingkat pendapatan masyarakat cenderung beragam, namun pada umumnya pendapatan masyarakat di Kelurahan Lingkas Ujung berkisar antara 1 juta hingga 2 juta per bulan.



**Gambar 2.** Kegiatan ekonomi masyarakat Kelurahan Lingkas Ujung

### Vitalitas Non Ekonomi

Perkembangan kota yang semakin pesat menuntut menghasilkan kemajuan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Pesisir Kecamatan Tarakan Timur dipersiapkan sebagai kawasan Central Business District (CBD), dengan dinamika ekonomi yang tinggi dan bertujuan menunjang perekonomian daerah. Hal ini berarti bahwa keberadaan kawasan permukiman kumuh, tidak sesuai dengan tujuan pembangunan Kota Tarakan yang berorientasi pada konsep Waterfront City (RTRW Kota Tarakan tahun 2010-2031).

Penilaian dari aspek bangunan, kondisi permukiman di Kelurahan Lingkas Ujung cenderung beragam, namun diindikasikan adanya keterkaitan antara perkerasan lantai bangunan dengan struktur bangunan. Hal ini dikarenakan perbedaan tipologi rumah antara rumah panggung yang berada di atas air dengan rumah tembok/permanen yang berada di daratan. Pada umumnya

bangunan rumah yang berada di tepi pantai atau di sungai berupa rumah panggung sehingga termasuk rumah semi hingga non permanen. Struktur bangunan dan kondisi bangunan liar di Kelurahan Lingkas Ujung dapat dilihat pada gambar 3 dan gambar 4.



**Gambar 3.** Struktur bangunan di Kelurahan Lingkas Ujung



**Gambar 4.** Bangunan liar di Kelurahan Lingkas Ujung

### Status Hunian

Berdasarkan aspek status kepemilikan bangunan, maka mayoritas merupakan hak milik. Hal ini menunjukkan bahwa bangunan rumah yang dihuni merupakan kepemilikan pribadi. Meskipun jika ditelaah dari kondisi struktur bangunan didominasi oleh bangunan non permanen dan semi permanen. Namun di sisi lain, permukiman kumuh cenderung terus berkembang dan menempati lahan-lahan kosong pada kawasan pesisir pantai, sehingga cenderung membentuk permukiman liar tanpa status hukum kepemilikan lahan yang jelas (Gotham, 2001).

### Kondisi Sarana Prasarana

Adanya sarana prasarana penunjang yang baik di permukiman akan meningkatkan kualitas lingkungan hunian. Sebaliknya kondisi sarana prasarana yang buruk dapat menjadi masalah

yang serius bagi lingkungan hunian, dan dapat mengakibatkan kekumuhan di lingkungan tersebut.

Secara umum, Kelurahan Lingkas Ujung telah terlayani oleh sarana-prasarana vital permukiman seperti air bersih, sanitasi, persampahan, jaringan jalan, listrik dan drainase. Namun permasalahannya adalah tingkat pelayanan yang tidak begitu baik, adapun beberapa permasalahan sarana-prasarana permukiman di Kelurahan Lingkas Ujung sebagai berikut:

- Sanitasi : pada permukiman di atas air, sebagian warga masih belum memiliki sistem sanitasi yang memadai, warga telah memiliki WC pribadi, namun pengelolaan septic-tank masih belum baik, warga membuang limbah septic-tank di perairan, sehingga mencemari laut (gambar 5).
- Air Bersih : Ekonomi masyarakat yang sebagian berpenghasilan rendah dari hasil melaut, dan ketidakpastian status hukum kepemilikan lahan menyebabkan sebagian masyarakat tidak dapat menikmati layanan PDAM. Sebagai solusinya, masyarakat setempat membeli air dari pedagang keliling ataupun menyimpan air hujan di tandon.
- Persampahan : Berdasarkan observasi lapang diketahui bahwa pada umumnya / rata-rata setiap RT di Kelurahan Lingkas Ujung telah terlayani oleh pasukan kebersihan. Namun terdapat warga yang masih mengolah sendiri sampahnya dengan cara di bakar, maupun langsung membuangnya ke laut. Hal ini dikarenakan alasan ekonomi, guna mengurangi pengeluaran untuk membayar petugas kebersihan.



**Gambar 5.** Kondisi MCK di Kelurahan Lingkas Ujung

### Kebijakan Pemerintah

Selain mengkaji aspek fisik dan non fisik

kawasan, dalam penelitian ini juga akan dibahas mengenai komitmen atau kebijakan pemerintah daerah terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh tepi pantai Kota Tarakan.

Pemerintah Kota Tarakan telah melakukan identifikasi terhadap permukiman kumuh tepi pantai di Kota Tarakan. Terdapat beberapa pokok isu utama yang dituangkan dalam rencana strategis penanganan permukiman kumuh di Kota Tarakan, dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2. Kebijakan Pemerintah Tarakan**

No	Tujuan	Isu Penting	Kebijakan
1	Penataan kawasan industri di pesisir	Kawasan industri pengolahan ikan menyebabkan tumbuhnya permukiman kumuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi kawasan permukiman kumuh</li> <li>• Rencana pembangunan rusun</li> </ul>
2	Penataan kawasan waterfront Kota Tarakan	Penduduk miskin/ nelayan pantai utara tarakan membentuk kelompok permukiman tepi pantai yang berdekatan dengan tambak dan kawasan pelabuhan bongkar muat PT Pertamina	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi kawasan permukiman kumuh</li> <li>• Sterilisasi kawasan sekitar pelabuhan PT Pertamina</li> <li>• Rencana pembangunan rusun</li> </ul>

Berdasarkan hasil interpretasi dari kebijakan tata ruang, ada kecenderungan penanganan permukiman kumuh tepi pantai oleh pemerintah Kota Tarakan, namun masih dalam taraf umum/ kebijakan global, belum ada sebuah kebijakan yang terperinci dan bersifat *action plan* di lapangan (RPPKP Kota Tarakan: 2010). Kebijakan pemerintah yang dilaksanakan adalah masih sebatas perencanaan dan penanganan temporal terhadap bahaya kebakaran pada permukiman kumuh. Jika dilihat dari aspek perencanaan yang berkelanjutan, pemerintah setempat perlu melakukan pelibatan masyarakat.

### Tingkat Kekumuhan

Analisis tingkat kekumuhan ini mengacu pada pedoman penentuan tingkat kekumuhan permukiman di tepi pantai yang dikeluarkan oleh Dirjen Pekerjaan Umum tahun 2006. Analisis ini membahas lima aspek utama yaitu Vitalitas Ekonomi, Vitalitas non Ekonomi, Status Kepemilikan Tanah, Sarana Prasarana dan Komitmen Pemerintah. Analisis ini berupa evaluasi skoring terhadap parameter-parameter kekumuhan sehingga akan didapatkan tingkat kekumuhan pada setiap unit sampel. Hasil perhitungan tingkat kekumuhan dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3. Penilaian Tingkat Kekumuhan**

No	Variabel					Total	Ket
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1	120	190	50	100	230	690	Tidak kumuh
2	100	290	50	110	230	780	Cukup kumuh
3	130	220	50	100	230	730	Cukup kumuh
4	100	260	50	110	230	750	Cukup kumuh
5	130	240	50	140	230	790	Cukup kumuh
6	130	320	100	190	230	970	Kumuh
7	120	290	100	170	230	910	Cukup kumuh
8	60	320	80	190	230	880	Cukup kumuh
9	90	260	80	140	230	800	Cukup kumuh
10	100	250	50	130	230	760	Cukup kumuh
11	130	320	100	170	230	950	Kumuh
12	100	260	50	170	230	810	Cukup kumuh
13	110	230	50	140	230	760	Cukup kumuh
14	110	310	50	110	230	810	Cukup kumuh
15	100	320	100	170	230	920	Kumuh
16	60	280	80	170	230	820	Cukup kumuh
17	70	260	80	150	230	790	Cukup kumuh
18	100	230	50	140	230	750	Cukup kumuh

Keterangan : 1. Vitalitas ekonomi 2. Vitalitas non ekonomi 3. Status lahan 4. Sarana prasarana 5. Komitmen pemerintah

Hasil skoring kekumuhan menunjukkan bahwa Rukun Tetangga (RT) yang termasuk dalam kategori kumuh yaitu RT 6, 11, dan 15. Sedangkan lainnya tergolong kategori cukup kumuh. Adapun RT 6, 11 dan 15 adalah kawasan permukiman tepi pantai yang berdekatan dengan industri pengolahan ikan dan pelabuhan migas.

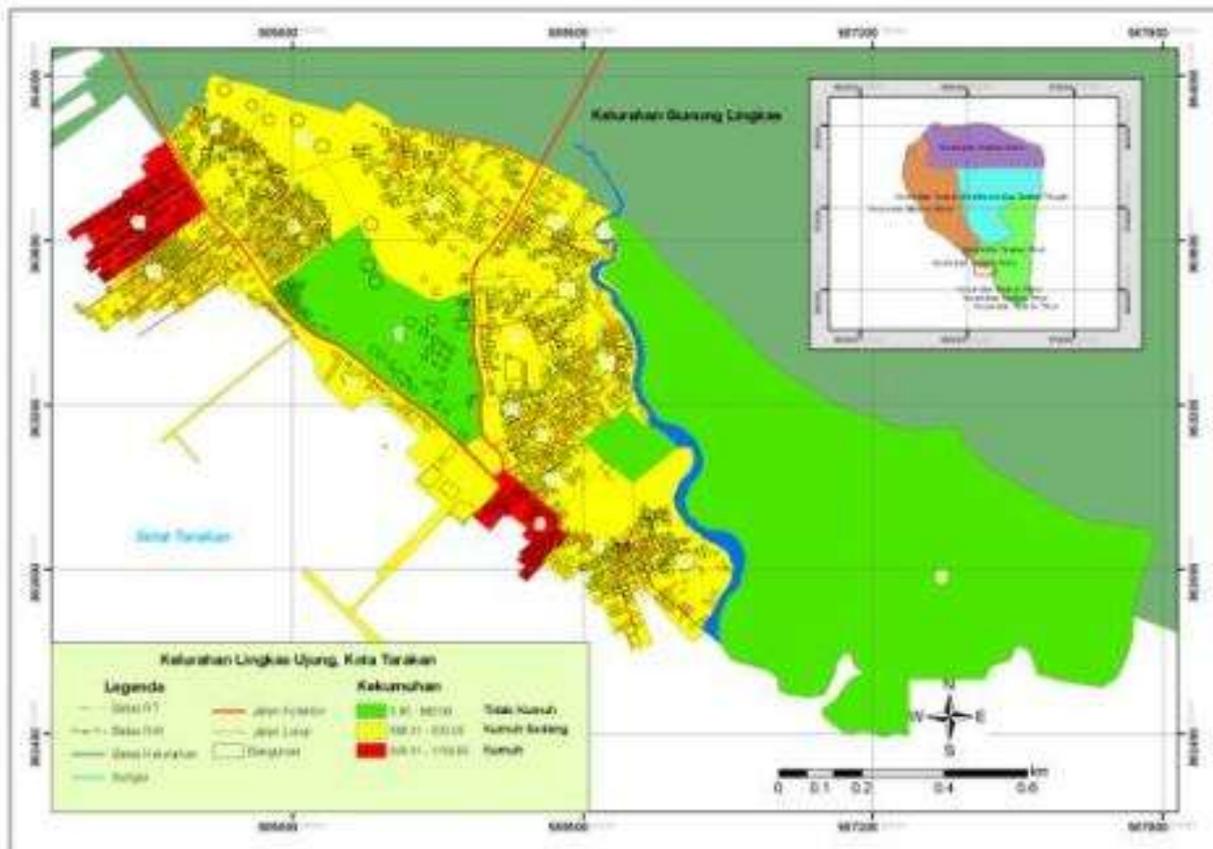
Pada RT ini, kondisi bangunan dan lingkungan cenderung buruk, yaitu dengan dominasi bangunan non permanen dan pencemaran lingkungan perairan (gambar 6).

**Kerawanan Kebakaran**

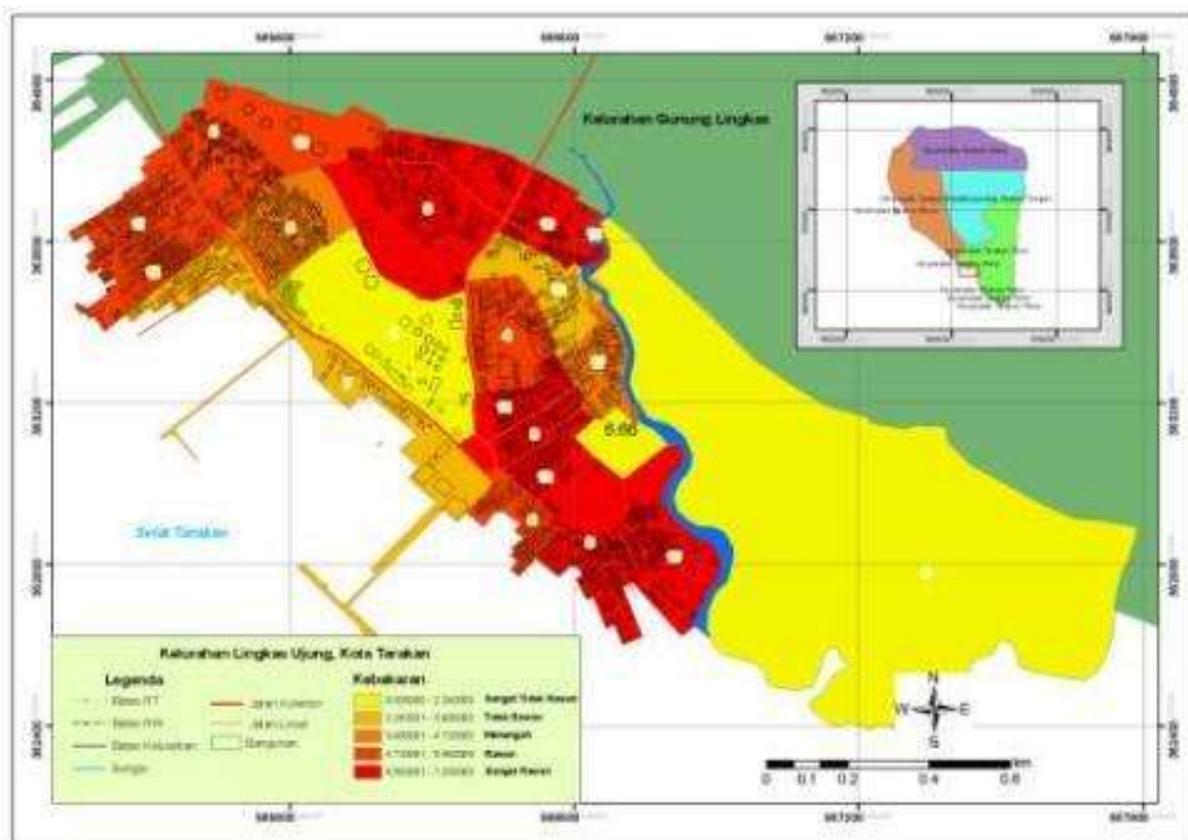
Analisis kerawanan bencana pada penelitian difokuskan pada ancaman bahaya kebakaran yang sering terjadi di kawasan permukiman tepi pantai Kota Tarakan termasuk permukiman Kelurahan Lingkas Ujung. Analisis kerawanan bencana kebakaran dihitung berdasarkan batas administrasi Rukun Tetangga (RT).

Adapun parameter-parameter yang dinilai yaitu kepadatan bangunan, aksesibilitas, kondisi bangunan dan lingkungan dan sumber air. Adapun hasil perhitungan yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.

Hasil perhitungan kerawanan kebakaran menunjukkan bahwa wilayah Rukun Tetangga yang rawan bahaya kebakaran yaitu RT 2, 3, 8, 14, 16, dan 18. Hal ini dikarenakan kondisi permukiman dengan kepadatan tinggi, dan bangunan semi permanen. Sedangkan Rukun Tetangga yang sangat tidak rawan adalah RT 1, karena pada lokasi ini jarak antar bangunan yang relatif jauh, dan kepadatan bangunan yang rendah (gambar 7).



**Gambar 6. Skoring tingkat kekumuhan**



Gambar 7. Peta skoring tingkat kerawanan kebakaran

Tabel 4. Penilaian Tingkat Kerawanan Kebakaran

No	Variabel				Total	Ket
	(1)	(2)	(3)	(4)		
1	0.4	0.6	0.6	0.1	1.7	Sangat tidak rawan
2	3.6	2.1	1	0.1	6.8	Sangat rawan
3	2.8	2.1	1	0.1	6	Sangat rawan
4	2.8	2.1	0.6	0.1	5.6	Rawan
5	2.8	2.1	0.6	0.1	5.6	Rawan
6	3.6	0.6	1	0.1	5.3	Rawan
7	1.2	0.6	1	0.1	2.9	Tidak rawan
8	3.6	2.1	1	0.1	6.8	Sangat rawan
9	2.8	0.6	1	0.1	4.5	Cukup rawan
10	1.2	0.6	1	0.1	2.9	Tidak rawan
11	3.6	0.6	1	0.1	5.3	Rawan
12	3.6	2.1	0.6	0.1	6.4	Rawan
13	2.8	2.1	0.2	0.1	5.2	Rawan
14	3.6	2.1	1	0.1	6.8	Sangat rawan
15	3.6	0.6	1	0.1	5.3	Rawan
16	2.8	2.1	1	0.1	6	Sangat rawan
17	2.8	0.6	0.2	0.1	3.7	Cukup rawan
18	2.8	2.1	1	0.1	6	Sangat rawan

**Keterkaitan Kekumuhan dan Kerawanan Kebakaran**

Keterkaitan antara daerah kumuh dengan bahaya kebakaran diindikasikan oleh beberapa faktor yaitu :

- **Kepadatan bangunan** : semakin padat bangunan di suatu wilayah, maka kondisi lingkungan akan semakin buruk. Jarak bangunan yang terlalu rapat akan memperbesar resiko kebakaran.
- **Aksesibilitas** : faktor kemudahan akses memiliki andil besar dalam kekumuhan dan bahaya kebakaran. Pada permukiman kumuh, jarak bangunan cenderung rapat dan aksesibilitas sulit, jalan penghubung relatif kecil dan sempit sehingga jika terjadi kebakaran akan menimbulkan masalah dalam penanganan dan upaya penanganan kebakaran.
- **Kondisi bangunan** : tipologi permukiman kumuh adalah bangunan dengan struktur semi dan non permanen. Konstruksi bangunan yang buruk akan memperbesar resiko kebakaran.

**Ketersediaan air** : air adalah sumber vital dalam penanganan kebakaran. Permukiman kumuh cenderung memiliki sarana-prasarana yang buruk, termasuk dalam hal penyediaan air bersih, karena ketersediaan air yang terbatas akan menyulitkan dalam penanganan kebakaran.

**Penanganan**

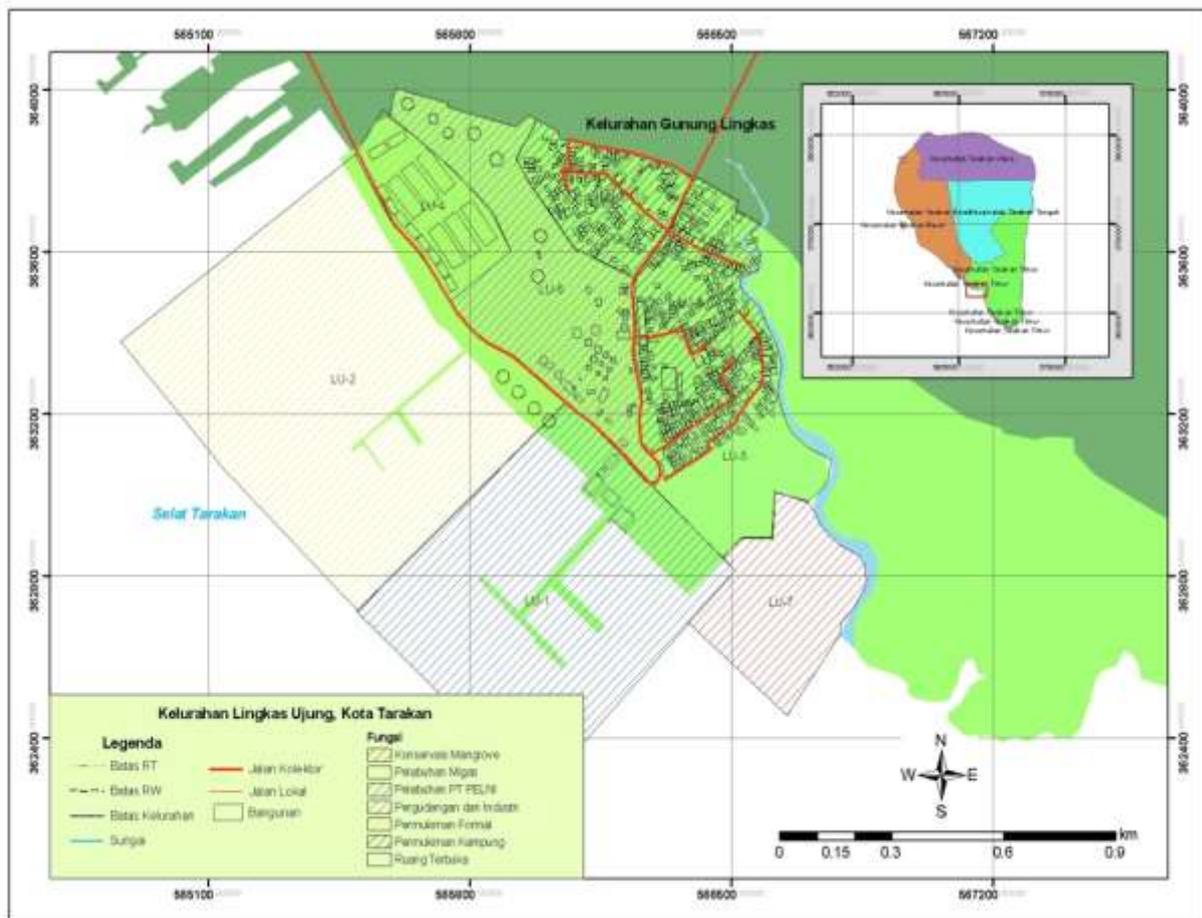
Rencana penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Lingkas Ujung Kota Tarakan di lakukan dengan peremajaan kawasan kumuh, dan

pendekatan teknis zona peruntukan. Berdasarkan rencana, maka kawasan pesisir Kelurahan Lingkas Ujung akan digunakan sebagai pendukung aktivitas pelabuhan PT PELNI dan pelabuhan migas PT Pertamina. Adapun rencana zonasi peruntukan yang akan digunakan akan dijabarkan sebagai berikut;

- a. Zona Pelabuhan (LU-1, LU-2) karena merupakan kawasan pelabuhan maka area di zona LU-1 dan LU-2 harus dibebaskan dari kegiatan permukiman di atas air, kegiatan nelayan perairan tangkap.
- b. Zona Permukiman Kampung (LU-3), yaitu permukiman yang tidak direlokasi.
- c. Zona Permukiman Formal (LU-4), yaitu permukiman relokasi dengan kosep Rumah Susun.

- d. Zona Ruang Terbuka (LU-5), direncanakan dengan kriteria terbebas dari kegiatan permukiman, maupun fungsi privat lainnya.
- e. Zona Industri dan Gudang (LU-6), peruntukan sebagai zona khusus kawasan industry dan pergudangan migas milik PT Pertamina.

Zona Konservasi Mangrove (LU-7), kawasan konservasi perairan dan hutan mangrove. Lokasi ini sebelumnya adalah daerah permukiman kumuh di atas air yang merupakan bagian dari RT 6, 8, 16 dan 18. Pasca relokasi, maka lokasi ini akan dikembalikan fungsinya untuk fungsi pendukung ekosistem pesisir, tidak diperkenankan adanya kegiatan permukiman dan sejenisnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 8.



**Gambar 8.** Peta zona fungsi peruntukan ruang di Kelurahan Lingkas Ujung

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan/ temuan studi sebagai berikut;

1. Karakteristik permukiman di Kelurahan Lings Ujung berupa perkampungan pesisir di atas air. Tipologi ini cenderung memiliki struktur bangunan semi permanen, kepadatan tinggi dan rawan terhadap bencana.
2. Tingkat kekumuhan di Kelurahan Lings Ujung Kota Tarakan beragam, Rukun Tetangga (RT) dengan kategori paling kumuh berada di RT 6 dan 11, sedangkan RT lainnya termasuk kategori kumuh sedang. RT yang termasuk sangat rawan kebakaran adalah RT 2, 3, 8, 14, 16, dan 18. Tingkat kerawanan kebakaran di permukiman kumuh dipengaruhi oleh kepadatan bangunan, aksesibilitas, struktur bangunan dan sumber air.
3. Penataan kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu jangka pendek untuk permasalahan kebakaran dan sanitasi, sedangkan rencana jangka panjang dengan perencanaan kawasan.

## Saran

Saran yang diberikan kepada pemerintah maupun penelitian berikutnya sebagai berikut;

1. Kelemahan penelitian ini terdapat pada kedetailan pembahasan tingkat RT, penelitian selanjutnya dapat memperdalam kedetailan pembahasan.
2. Penelitian selanjutnya diarahkan pada upaya partisipasi masyarakat dalam kegiatan perbaikan sarana-prasarana lingkungan permukiman, mengangkat topik mengenai perilaku masyarakat yang menyebabkan kekumuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- BAPPEDA Kota Tarakan. 2010. *RTRW Kota Tarakan tahun 2010-2031*. Laporan tidak diterbitkan. Tarakan.
- Dinas Tata Kota Tarakan. 2005. *Identifikasi dan Dokumentasi Informasi Daerah Rawan Kebakaran*. Laporan tidak diterbitkan. Kota Tarakan.
- Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman. 2006. *Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh*. Pedoman Umum. Jakarta.
- Gotham, Kevin Fox. 2001. *A City Without Slum*. American Journal of Economic and Sociology. Vol 60-2001
- Hesley, W Robert et al. 1995. *Strategic Growth Control*. Regional Science and Urban Economics Journal No 25 (1995) 435-460. www.Elsevier.com
- Jenkis, Paul et al. 2007. *Planning and Housing In The Rapidly Urbanising World*. New York : Routledge
- Kementerian Pekerjaan Umum. 2009. *Ketentuan Teknis Manajemen Resiko Kebakaran di Perkotaan no 20/PRT/2009*. Pedoman Umum. Jakarta.
- Pemerintah Kelurahan Lings Ujung. 2011. *Profil Kelurahan Lings Ujung*. Kelurahan Lings Ujung. Laporan tidak diterbitkan. Tarakan.
- Silas, Johan. 1990. *Pembangunan Permukiman Bertumpu Pada Masyarakat*. Bandung: Gunadarma.
- Singarimbun, Masri et all. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S
- Taylor, 1972. *Jurnal Penelitian Permukiman* Vol. 17 No. 2, 2001.

